



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

Padal 3

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Renja Badan Daerah;
- f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Renja Kecamatan.

(2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal **26 OKTOBER 2018**

BUPATI BANTUL



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal **26 OKTOBER 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR **110**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Adanya penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sehingga, perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; dan
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.2 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun 2017) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Pengembangan Sistim pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
3. Program Pemberdayaan Pedagang
4. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
4. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
3.06.3.06.01.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	orang barang	312	509,500,000	312	509,500,000.00	100	100
		Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	25		25	-	100	
		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	jenis	15		15	-	100	
		Jumlah Perangko, Materai Dan Benda Pos lainnya	lembar	1700		1,700	-	100	
		Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	jenis	30		30	-	100	
		Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	bulan	12		12	-	100	
		Jumlah Surat Kabar/Majalah	eksemplar	1080		1,080	-	100	
		Jumlah Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	lokasi	1		1	-	100	
		Jumlah Jenis Barang Cetak	jenis	26		26	-	100	
		Jumlah Penggandaan	lembar	110840		110,840	-	100	
		Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	oh	13000		13,000	-	100	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Pompa	unit						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	unit			-	-		
		Jumlah Tambah Daya Listrik	lokasi	3		3	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rapat	orang	969	981,360,100	969	981,360,100	100	100
		Jumlah Peserta Kegiatan	orang	3247		3,247	-	100	
		Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	1337		1,337	-	100	
		Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	200		200	-	100	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Terkait Perdagangan	orang	150		150	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Pembayaran Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	ob	2520	4,898,855,612	2,520	4,898,855,612	100	100
		Pembayaran Sewa Tanah/Lahan untuk Pasar	pasar/ta hun	12		12	-	100	
		Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan Bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	ob	2520		2,520	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98	994,150,000	98	994,150,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor	unit	2	57,875,000	2	57,875,000	100	100
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	unit						
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan perlengkapan kantor	unit	95	321,650,000	95	321,650,000	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
		gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem)							
		Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV)	unit	23		23	-	100	
		jumlah penyediaan display barang	unit	1		1		100	
		Jumlah Pengadaan Meja Kerja Pejabat	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	unit			-	-		
		Jumlah Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	paket			-	-		
		Jumlah Pengadaan Sound System	unit			-	-		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Bahan Baku Bangunan untuk pemeliharaan gedung	unit		257,875,000	-	257,875,000	100	
		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	unit	1		1		100	
		Jumlah Ruang Rapat/Ruang Kerja Yang Direhab	paket	1		1	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	unit	38	311,750,000	38	311,750,000	100	100
		Jumlah Penggantian Suku Cadang	unit	21547		21,547	-	100	
		Tersedianya BBM Operasional	liter			-	-		
		Belanja Jasa KIR	kali	2		2	-	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	buah	28		28	-	100	
		Belanja Pengisian Freon	kali	8		8		100	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengisian freon	unit		45,000,000	-	45,000,000		100
		Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	unit	45		45		100	
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	100,875,000	100	100,875,000	100	100
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Kapasitas Sumberdaya Aparatur	orang	85	100,875,000	85	100,875,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	angka	80	178,750,000	80	178,750,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 06.09	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Jumlah Pendampingan Implementasi SMM	kali	8	100,000,000	8	100,000,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen Perencanaan/evaluasi yang dihasilkan	dokumen	12	78,750,000	12	78,750,000	100	100
		Jumlah Peserta FGD Perencanaan	orang	60		60	-	100	
		Jumlah Peserta FGD Monev	orang	30					
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTPP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/teraulang	%	7	2,430,450,000	7	2,430,450,000.00	100	100
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12	Pelayanan Kemetrollogian Daerrah	Belanja Operasional UPT Metrologi	bulan	12	2,430,450,000	12	2,430,450,000	100	100
		Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	240		240	-	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Kemetrologian							
		Jumlah Penyediaan Alat Standar Pelayanan Kemetrologian	paket	1		1	-	100	
		Jumlah Gedung UPT Yang Terpelihara	unit	1		1	-	100	
		Jumlah Penyediaan Alat Standar Kemetrologian (DAK)	paket	1		1	-	100	
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrologian Roda 4 (DAK)	unit	2		2	-	100	
		Jumlah Pengadaan Electric Generating Set	unit						
		Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus	unit						
		Jumlah Pengadaan Alat Kalibrasi	unit						
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13	Pelayanan Pengamanan Perdagangan	Kajian Pupuk Bersubsidi	dokumen			-	-		
		Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis	dokumen			-	-		
		OPM Barang Kebutuhan Pokok Strategis	kali			-	-		
2.04 . 3.06.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pembebasan tanah pasar dari status tanah kas desa menjadi tanah milik pemda	lokasi			-	-		
2.04 . 3.06.01 . 16 . 12	Pengadaan tanah dari tanah kas desa	Tanah kas desa yang dibebaskan	m2			-	-		
		Jumlah Dokumen Appraisal	dokumen			-	-		
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah nilai ekspor	US\$	75.180.000	1,724,005,000	75.180.000	1,724,005,000.00	100	100
3.06 . 3.06.01 . 17.09	Pengembangan ekspor dengan	Kajian Peraturan	dokumen	1	285,755,000	1	285,755,000.00	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	instansi terkait/asosiasi pengusaha	Perijinan Usaha Perdagangan							
		Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Bidang Perdagangan	orang	120				100	
		Jumlah Peserta Monev Ijin Usaha Bidang Perdagangan	orang	30				100	
		Publikasi Lewat Media Cetak dan Elektronik	kali	12				100	
		Terlaksananya Publikasi Melalui Sosial Media	paket	1				100	
3.06 . 3.06.01 . 17.16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan MPLN, Kemasan, serta Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan	orang	120	1,438,250,000	120	1,438,250,000.00	100	100
		Jumlah Pameran Produk yang Difasilitasi / Diikuti	kali	8		8	-	100	
		Jumlah peserta pelatihan Kemasan	orang			-	-		
		Jumlah peserta pelatihan pemasaran dan distribusi	orang			-	-		
		Jumlah peserta pelatihan pemasaran online	orang			-	-		
		Jumlah hadiah lomba stand Bantul Expo	paket			-	-		
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis	%	≤ 5	369,000,000	≤ 5	369,000,000.00	100	100
3.06 . 3.06.01 . 18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Terlaksananya Operasi Pasar Murni	kali	3	192,175,000	3	192,175,000.00	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		(OPM) barang kebutuhan pokok strategis							
		Jumlah Kajian Pemetaan Toko Modern dan Pasar Tradisional; Jumlah Kajian Pemetaan Agen LPG, Pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis; Jumlah Pemetaan Jalur Distribusi Bahan Pokok Strategis	dokumen	3		3		100	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Honorarium manajer pengelola gudang SRG	orang bulan		87,825,000			100	100
		Operasional Gudang SRG	bulan						
		Jumlah peserta sosialisasi SRG	orang	150		150	-	100	
		Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG	dokumen			-	-		
		Jumlah Penyediaan Baliho SRG	unit	1		1	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16	Peningkatan pelayanan perdagangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Terkait Pelayanan Perdagangan	orang	120	89,000,000	120	89,000,000.00	100	100
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Perdagangan	jenis pengawas an	9		9	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah kawasan pedagang kaki lima	kawasan	2	1,700,875,000	2		100	100
3.06 . 3.06.01 . 19.03	Kegiatan Penempatan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Tempat Kuliner (PK)	lokasi	1	750,000,000	1	750,000,000.00	100	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
3.06 . 3.06.01 . 19.07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Relokasi Pedagang Pantai Depok	orang	100	950,875,000	100	950,875,000.00	100	100
		Jumlah Kajian Penataan PKL	dokumen	1		1	-	100	
		Jumlah Lokasi Terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan	lokasi	2		2	-	100	
		Jumlah Penyediaan Tenda Bagi PKL	unit	50		50	-	100	
3.06 . 3.06.01 . 20	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	4,4	1,098,125,000		1,098,125,000.00	100	100
3.06 . 3.06.01 . 20.05	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI; Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar; Jumlah Peserta Sarasehan Pedagang Pasar; Jumlah Peserta Grebeg Pasar	orang	1702	1,098,125,000	1,702	1,098,125,000.00	100	100
		Promosi Pasar yang Terlaksana	kali	10		10	-	100	
		Peresmian Pasar yang Terlaksana	kali	1		1	-	100	
		Jumlah Pengadaan Baliho	unit	6		6		100	
3.06 . 3.0601.01 . 22	Program Penataan Pasar Rakyat	cakupan jumlah kondisi pasar baik	%	69,70%	9,159,665,629		9,159,665,629.00	100	100
3.06 . 3.0601.01 . 22.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Jumlah DED Pembangunan Pasar	dokumen	1	3,332,595,629	1	3,332,595,629	100	
		Jumlah Pasar yang Dibangun/Rehab (besar)	pasar	16		16		100	
		Jumlah Pasar yang Direhab (kecil)	pasar	1		1		100	
		Jumlah Gudang	unit	1		1		100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018			
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
		Pasar yang Terbangun							
		Terbangunnya Mushola Pasar Dlingo	unit	1		1		100	
		Terbangunnya Tambatan Hewan	paket	1		1		100	
		Terbangunnya MCK Pasar Barongan	paket	1		1		100	
3.06 . 3.0601.01 . 22.02	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (pasar imogiri)	bulan	12	11,500,000	12	11,500,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	pasar	5	5,735,000,000	5	5,735,000,000	100	100
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK	kali	36	80,570,000	36	80,570,000	100	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Berikut disajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	REALISASI INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			1 (2016)	2 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
(1)	(4)	(5)			(7)	(8)	(9)	(10)	
	Jumlah pasar tipe A (unit)	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit)	0	1	1	2	3	4	4
	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n - PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1 / PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1 x 100% (persen)	7,63	6,73	4,76	6,33	6,62	6,95	6,95
	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	Nilai ekspor tahun n - Nilai ekspor tahun n-1 / Nilai ekspor tahun n-1 x 100% persen)	7	7,09	7,10	7,15	7,2	7,25	7,25

Dalam mencapai tujuan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.3

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan					
1.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kuantitatif	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{PDRB sub kategori perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat					
5.	Jumlah pasar tipe A	Kuantitatif	Jumlah pasar dengan tipe A	Perhitungan/penilaian jumlah pasar tipe A yang kriterianya sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Pasar	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip per bulan; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor					
6.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Kuantitatif	$\frac{\text{nilai ekspor tahun } n - \text{ nilai ekspor tahun } (n - 1)}{\text{nilai ekspor tahun } n - 1} \times 100\%$	Data bersumber dari jumlah SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY kemudian diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul. SKA adalah surat keterangan kebangsaan suatu barang yang disertakan pada saat barang tersebut memasuki wilayah negara tujuan ekspor tertentu untuk memberitahukan bahwa barang tersebut berasal/diolah dari suatu negara	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke DIY; entri data ke e-sakip per bulan, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran per triwulan

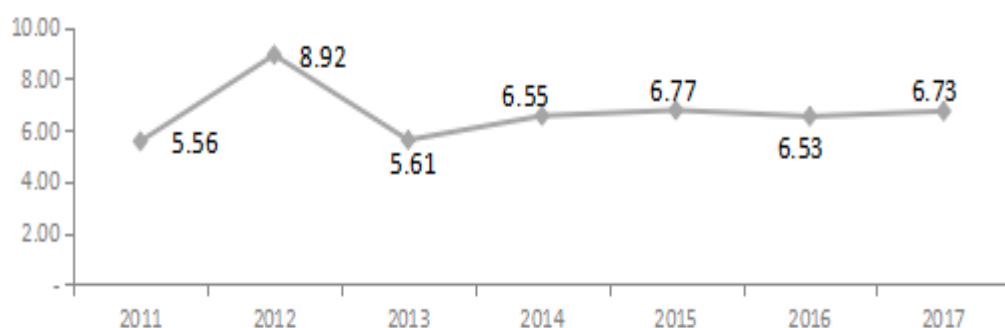
Pencapaian indikator Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Tabel 2.4 Pengukuran Kinerja
DINAS PERDAGANGAN Tahun Anggaran 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,61	6,73	145,99
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A	unit	1	1	100.00
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,09	101.29

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **115,76%**.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.



Gambar 2.2 PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017 (diolah oleh Dinas Perdagangan Kab. Bantul).

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2017 yakni:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Kategori pasar rakyat tipe A didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/M_DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam peraturan tersebut diuraikan kriteria pasar tradisional tipe A yaitu:

- a. Luas lahan minimal 3.000 m²
- b. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- c. Peruntukan lahan sesuai dengan RTRW daerah setempat;
- d. Jumlah pedagang minimal 150 pedagang
- e. Bangunan utama berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - a. Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. Ruang serbaguna untuk pembinaan pedagan, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²
 - c. Toilet/wc
 - d. Tempat ibadah
 - e. Pos ukur ulang (minimal 2x2 m)
 - f. Pos kesehatan
 - g. Pos keamanan
 - h. Drainase (ditutup dengan grill)
 - i. Tempat penampungan sampah sementara
 - j. Gedung tempat penyimpanan stok barang
 - k. Area bongkar muat;

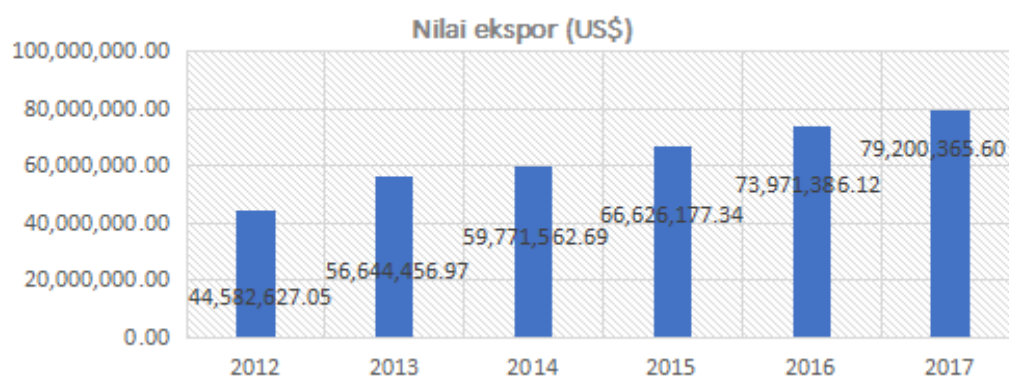
- l. Tempat parkir
 - m. Area penghijauan
 - n. Hidran/alat pemadam kebakaran
 - o. Instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - p. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
 - q. Telekomunikasi
 - r. Sistem informasi harga dan stok
 - s. Papan pengumuman informasi harga harian
- f. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum
 - g. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar
 - h. Operasional pasar dilakukan setiap hari
 - i. CCTV yang terhubung secara online untuk memantau aktifitas perdagangan

Dari sekian banyak kriteria, untuk kriteria luas, jumlah pedagang, dan operasional pasar sebenarnya sudah dipenuhi oleh 4 pasar besar yakni pasar Imogiri, pasar Bantul, pasar Niten, dan Pasar Piyungan. Namun hanya satu pasar yang telah memenuhi semua kriteria pasar tipe A yaitu Pasar Imogiri. Dengan demikian target pasar tipe A sebanyak 1 unit pada tahun 2017 tercapai 100 persen. Diharapkan pada akhir tahun Renstra (2021) 3 pasar lainnya dapat memenuhi semua kriteria pasar tipe A sehingga pasar tipe A sebanyak 4 unit pada akhir tahun 2021 tercapai. Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program:

- a. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- b. Program Pemberdayaan Pedagang
- c. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan ekspor adalah pertumbuhan nilai ekspor. Capaian indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah sebesar 7%, realisasi sebesar 7,09%, tercapai 101,29% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dengan nilai ekspor sebanyak 79.200.365,60 US\$, jumlah komoditi yang diekspor sebanyak 25 komoditi, jumlah eksportir sekitar 37 eksportir, serta terdapat 44 negara tujuan ekspor.

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti sarung tangan, tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Perkembangan ekspor Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3. Perkembangan Ekspor 2014-2017

Capaian sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat ini didukung oleh program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dan Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Dari kemampuan keuangan daerah, maka jumlah pendanaan yang untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp24.814.281.880,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp19.625.360.516,00 atau sebesar 79,09%.

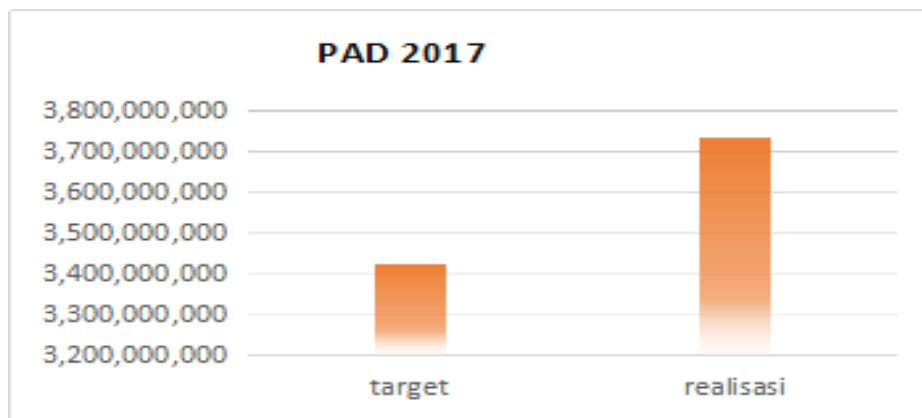
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa	%
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.156.520.000	3.558.013.904	598.506.096	14,40
2	Jumlah pasar rakyat tipe A	9.579.282.500	9.088.899.292	490.383.208	5,12
3	Pertumbuhan ekspor	1.532.763.000	1.477.701.550	55.061.450	3,59
Jumlah		1.532.763.000	1.477.701.550	1.143.950.754	4,61
Belanja Langsung Pendukung		9.545.716.380	5.500.745.770	4.356.795.016	45,64
Total Belanja langsung		24.814.281.880	19.625.360.516	5.188.921.364	79,09

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Dinas Perdagangan mempunyai unit ekonomi yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, MCK pasar, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari target PAD sebesar Rp 3.423.000.000,00 mampu tercapai sebesar Rp 3.732.640.519 atau terealisasi sebesar 100,05%. PAD terbesar bersumber dari retribusi pelayanan pasar berupa sewa kios/los.



Gambar 2.4 Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Perdagangan I Tahun 2017 adalah **81,53**.

Tabel 2.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 81,53 dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit

Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul kategori “**SANGAT BAIK**”.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- a. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
- b. Kualitas Data;
- c. Kompetensi SDM;
- d. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
- e. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
- f. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
- g. Laju impor dan produk dari luar daerah;
- h. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
- i. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
- j. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
- k. Maraknya rentenir;
- l. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
- m. Belum tertibnya usaha PKL;
- n. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
- o. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (STRENGTHS)

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan

Kelemahan (WEAKNESSES)

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

Peluang (OPPORTUNITIES)

1. Berkembangnya industri kreatif
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Meningkatnya akses pasar ekspor
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
6. Kabupaten Bantul sebagai city logistic
7. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD
8. Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik \pm 7 juta / tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat
9. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Bandara dan Kawasan Industri

Ancaman (*THREATS*)

1. Lemahnya penegakan hukum (low enforcement);
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah

Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNAL	
SDM	Jumlah dan kompetensi aparaturnya yang kurang memadai	Penerapan SP dan SOP yang baku, sistematis dan terkontrol belum optimal	Belum adanya anjabin aparaturnya Dinas Perdagangan yang komprehensif guna menentukan jumlah dan kompetensi aparaturnya yang ditempatkan di Dinas Perdagangan	Jumlah dan kompetensi aparaturnya yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrolgian serta Aparatur PPNS
Sarana dan Prasarana	Peralatan pelayanan untuk perdagangan termasuk metrologi terbatas		Peralatan pelayanan tertentu untuk bidang kemetrolgian sangat mahal	Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolgian sangat mahal dan jumlahnya terbatas Optimalisasi pelaksana terganggu karena keterbatasan dukungan peralatan. Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung
Data base	Data belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Akses informasi dan penggalian karakteristik data masih lemah.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai	Data di Pemerintah kabupaten Bantul belum terintegrasi	Databse perdagangan yang belum optimal Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai
Pengawasan	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal			Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.8. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian nilai AKIP	83	7,409,838,273	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian nilai AKIP	83	10,660,450,000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				560,450,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran				560,450,000	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1,322,047,100	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi				1,600,000,000	Menambah jumlah pameran produk ekspor yang difasilitasi; ekstra fooding/vitamin untuk petugas lapang di pasar-pasar
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				5,527,341,173	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				8,500,000,000	pembebasan TKD menjadi milik pemda sehingga status tanah untuk pembangunan/rehab pasar menjadi clear and clean

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1,593,565,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	1,593,565,000	
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional				563,662,500	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional				563,662,500	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				353,815,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				353,815,000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				283,662,500	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor				283,662,500	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				342,925,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				342,925,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				49,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				49,500,000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur	100	110,962,500	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur	100	110,962,500	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				110,962,500	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				110,962,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian nilai evaluasi kinerja	81	186,625,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian nilai evaluasi kinerja	81	186,625,000	
	Penyusunan sistem manajemen mutu				100,000,000	Penyusunan sistem manajemen mutu				100,000,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				86,625,000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				86,625,000	
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapan nyayyang ditera/tera ulang	7.5	2,722,027,000	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapan nyayyang ditera/tera ulang	7.5	3,222,027,000	
	Pelayanan Kemetrolgian Daerah				2,722,027,000	Pelayanan Kemetrolgian Daerah				3,222,027,000	Pendampingan APBD untuk DAK metrologi legal
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		Jumlah nilai ekspor	76.722.600	1,923,608,500	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		Jumlah nilai ekspor	76.722.600	2,148,608,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha				338,783,500	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha				338,783,500	
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				1,584,825,000	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah				1,809,825,000	Penambahan jumlah peserta pelatihan pemasaran
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Persentase deviasi harga komoditas strategis	≤ 5	405,900,000	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Persentase deviasi harga komoditas strategis	≤ 5	405,900,000	
	pengembangan pasar dan distribusi barang produk				211,392,500	pengembangan pasar dan distribusi barang produk				211,392,500	
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				96,607,500	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				96,607,500	
	Peningkatan pelayanan perdagangan				97,900,000	Peningkatan pelayanan perdagangan				97,900,000	
	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Jumlah kawasan pedagang kaki lima	3	1,870,962,000	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Jumlah kawasan pedagang kaki lima	3	1,870,962,000	
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (PIK)				825,000,000	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (PIK)				825,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				1,045,962,000	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				1,045,962,000	
	Program Pemberdayaan Pedagang		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	4,6	1,207,937,500	Program Pemberdayaan Pedagang		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	4,6	1,207,937,500	
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				1,207,937,500	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar				1,207,937,500	
	Program Penataan Pasar Rakyat		cakupan jumlah kondisi pasar baik	72,73%	10,295,632,000	Program Penataan Pasar Rakyat		cakupan jumlah kondisi pasar baik	72,73%	10,295,632,000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi pasar rakyat				4,459,355,000	Pembangunan dan Rehabilitasi pasar rakyat				4,459,355,000	
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI				12,650,000	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI				12,650,000	
	Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)				5,735,000,000	Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)				5,735,000,000	
	Intensifikasi Pendapatan Pasar				88,627,000	Intensifikasi Pendapatan Pasar				88,627,000	
	JUMLAH				27,727,057,773					30,109,104,500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum Perangkat Daerah dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, seperti tersaji dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.7

Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Bantul

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengembangan pasar dan ekspor daerah	desa Banguntapan	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)
			Desa Gumulan, Desa Gluntung, Desa Glagahan, Desa Tegalsempu dan Desa Tegal layang	Jumlah peserta pelatihan perijinan dan manajemen pemasaran	200 orang (10 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)
			Gadingsari	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (forum Perangkat Daerah)

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
			Desa Gadingsari	Terlaksananya pelatihan manajemen pemasaran di tingkat nasional/internasional bagi produk unggulan industri kecil	40 orang (2 kelompok @20 orang)	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)
2	Penataan Pasar Rakyat	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Desa Srihardono	Terlaksananya rehab pasar Pundong	1 pasar	non PIK
			Desa Ngestiharjo	Terlaksananya pembangunan kios pasar desa Ngestiharjo	1 kios	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)
			Desa Sidomulyo	Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan pasar Turi	1 pasar	PIK (dalam aplikasi SEPAKAT)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
- b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Peningkatan perlindungan konsumen- % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Pertumbuhan ekspor non migas
- Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 yaitu:

- a. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
- b. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2019 yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
- b. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
- c. Pertumbuhan Nilai Ekspor

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Target Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A (unit)	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit)	2
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n - \text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1}{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun } n-1} \times 100\%$ (persen)	6,33
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1}{\text{Nilai ekspor tahun } n-1} \times 100\%$ (persen)	7,15

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

4.1. Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perdagangan dalam Perubahan Renja 2019 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Bantul, pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekspor, pengawasan dan distribusi perdagangan, dan pengembangan pasar.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2019:

Jumlah Program	:	9
Jumlah Kegiatan	:	24
Pagu Indikatif APBD	:	Rp 21.112.311.345
Pagu Indikatif APBN/DAK	:	Rp 40.000.000.000

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul di Tahun 2019 adalah :

I. Program Utama Urusan Perdagangan:

Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan
Pelayanan Kemetrelogian Daerah
Program dan Peningkatan Pengembangan Ekspor
Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi Pengusaha
Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk
Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sitem Resi Gudang
Peningkatan Pelayanan Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan (PIK)
Pemberdayaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Program Pemberdayaan Pedagang
Peningkatan SDM ,Kelembagaan dan Promosi Pasar
Program Penataan Pasar Rakyat
Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat
Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)
Intensivikasi Pendapatan Pasar

Program Pendukung:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantorn
Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan /Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi,Bimtek,dan Peningkatan Kapasitas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja
Penyusunan Sintem Managemen Mutu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
030601	DINAS PERDAGANGAN				22,559,680,211.00	23,569,888,802.43		
03	URUSAN PILIHAN				22,559,680,211.00	23,569,888,802.43		
0306	PERDAGANGAN				22,559,680,211.00	23,569,888,802.43		
0306.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian nilai AKIP	83 Angka	8,485,014,279.00	8,864,967,994.78		
0306.030601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 33 Pasar Rakyat	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	288 Ob	837,291,099.00	874,784,478.95	KB	P1
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25 Jenis					
		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	15 Jenis					
		Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2000 Lembar					
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30 Jenis					
		Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12 Bulan					
		Jumlah Surat Kabar / Majalah	1080 Eksemplar					
		Jumlah Jenis Barang Cetak	26 Jenis					
		Jumlah Penggandaan	143305 Lembar					

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306.030601.0 1.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kecamatan, DIY dan Luar DIY	Jumlah Peserta Rapat Jumlah Peserta Kegiatan Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	600 Orang 2247 Orang 2586 Op 170 Op	1,132,491,800.00	1,183,204,085.61		P1
0306.030601.0 1.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah pembayaran pegawai kontrak/PHL/Non PNS Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantul) Jumlah lokasi pasar yang tanahnya menjadi milik Pemda	2488 ob 2488 ob 15 pasar/tahun 1 pasar	6,515,231,380.00	6,806,979,430.22		P1
0306.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	1,092,122,940.00	1,141,027,532.91		
0306.030601.0 2.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	2 Unit	60,875,000.00	63,600,945.02		P1
0306.030601.0 2.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor (Pompa Air, lemari, AC, Kipas Angin, kursi pejabat, soundsystem, cctv) Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor (Komputer dan Kelengkapannya, Laptop, Printer)	60 unit 21 unit	393,065,440.00	410,666,668.42		P1
0306.030601.0 2.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Jumlah Ruang Rapat/Ruang Kerja yang Direhab	1 Unit 1 unit	283,662,500.00	296,364,732.12		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306.030601.0 2.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	38 Unit	305,020,000.00	318,678,607.82		P1
0306.030601.0 2.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	45 Unit	49,500,000.00	51,716,579.53		P1
0306.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur	100 Persen	110,962,500.00	115,931,332.44		
0306.030601.0 5.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DIY/ Luar DIY	Jumlah Peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	85 orang	110,962,500.00	115,931,332.44		P1
0306.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian nilai evaluasi kinerja	81 Angka	199,525,000.00	208,459,606.67		
0306.030601.0 6.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Perdagangan	Jumlah pendampingan implementasi SMM	8 kali	120,000,000.00	125,373,526.12		P1
0306.030601.0 6.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi yang dihasilkan Jumlah peserta FGD perencanaan Jumlah peserta FGD monev	12 dokumen 60 orang 40 orang	79,525,000.00	83,086,080.54		P1
0306.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya)yang ditera/tera ulang	7.5 persen	1,707,720,760.00	1,784,191,444.31		
0306.030601.1 5.004	Pelayanan Kemetrolgian Daerrah	Kab. Bantul, DIY, dan Luar DIY	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Sosialisai Kemetrolgian Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolgian Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar	60.000 unit 25 kali 3 kali 3 kali 60 kali	1,707,720,760.00	1,784,191,444.31		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Sidang Tera Ulang di Puskesmas	15 kali				
			Jumlah Tera/Tera Ulang Dilokasi UTP Berada	100 kali				
			Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	1 kegiatan				
0306.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		Jumlah nilai ekspor	76722600 US\$	1,472,510,000.00	1,538,448,091.28		
0306.030601.1 7.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kab. Bantul	Jumlah Fasilitas Perijinan	110 Perusahaan	159,075,000.00	166,198,280.57		P1
			Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik	29 Kali				
			Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media	1 Dokumen				
			Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan	225 Orang				
0306.030601.1 7.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kab. Bantul, DIY, Jakarta, Bali, Lombok	Pameran yang diikuti	7 kali	1,313,435,000.00	1,372,249,810.71		P1
			Jumlah Peserta Pelatihan	120 orang				
			Jumlah Pendataan dan Kajian Eksportir	1 dokumen				
0306.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Persentase deviasi harga komoditas strategis	5 persen	159,828,000.00	166,984,999.45		
0306.030601.1 8.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten Bantul	jumlah pemetaan	1 dokumen	69,842,500.00	72,970,004.15		P1
			jumlah operasi pasar	3 kali				
			Jumlah Peserta Temu Usaha & FGD	120 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306.030601.1 8.009	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG Tirtonirmolo, SRG Pendowoharjo	jumlah penerbitan resi Jumlah Peserta Sosialisasi dan Temu Usaha Jumlah Peralatan SRG	25 dokumen 200 Orang 2 Unit	46,815,500.00	48,911,869.27		P1
0306.030601.1 8.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 Kecamatan/ Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi Jumlah Peserta FGD Yang Dilaksanakan	9 jenis 90 orang	43,170,000.00	45,103,126.02		P1
0306.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN		Jumlah kawasan pedagang kaki lima	3 kawasan	1,375,259,500.00	1,436,842,773.76		
0306.030601.1 9.003	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kab. Bantul	jumlah lokasi sentra kuliner	1 kawasan	622,975,000.00	650,871,436.98		P1
0306.030601.1 9.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	33 Pasar	Jumlah Tenda untuk PKL Jumlah Kawasan PKL yang terbangun	25 unit 1 kawasan	752,284,500.00	785,971,336.78		P1
0306.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG		Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	4.6 persen	921,446,071.00	962,707,858.79		
0306.030601.2 0.005	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar		Jumlah Pendampingan APPSI Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar 13 kali Jumlah Lomba Pasar Bersih Jumlah Grebeg Pasar Jumlah Peresmian Pasar Jumlah Penayangan Advetorial dan Videotron Jumlah Baliho 2 (dua) muka Jumlah Baliho 1 (satu) muka	210 orang 520 orang 1 kali 1 kali 1 kali 2900 kali 2 unit 2 unit	921,446,071.00	962,707,858.79		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0306.22	PROGRAM PENATAAN PASAR RAKYAT		cakupan jumlah kondisi pasar baik	72.73 persen	7,035,291,161.00	7,350,327,168.05		
0306.030601.2 2.001	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat	Jumlah DED pembangunan pasar (Pasar Pundong, Mangiran, Bantul) Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar rakyat	2 Dokumen 20 pasar	3,362,983,535.00	3,513,575,867.34		P1
0306.030601.2 2.002	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pasar Imogiri, Kabupaten Bantul	Jumlah pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri)	1 Pasar	26,429,000.00	27,612,474.35	KSB	P1
0306.030601.2 2.003	Revitalisasi Pasar Rakyat	Pasar Mangiran dan Pasar Pundong	Terlaksananya pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi pasar rakyat	2 unit	3,400,000,000.00	3,552,249,906.86	KSB	P1
0306.030601.2 2.004	Insentififikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat Jumlah Penguatan SDM Pasar	1 Dokumen 1 Kali 1 Kali	245,878,626.00	256,888,919.50	KSB	P1

BAB V **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah periode Tahun 2019 yang disusun dalam rangka menyesuaikan program/kegiatan dan target kinerja yang diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.


BUPATI BANTUL
SUHARSONO